

ACCENTUATION OF VILLAGE APPARATUS IN PREVENTION AND REDUCTION OF STUNTING IN BANYUWANGI

Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi

Kuni Putri Safinah¹; Hary Priyanto²; Safrieta Jatu Permatasari³

¹² Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

^a kuniputrisafinah45@gmail.com

(*) Corresponding Author
 kuniputrisafinah45@gmail.com

How to Cite: Rae Tisha Vania, Banung Grahita. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. doi: 10.36526/js.v3i2. 3527

Received: 29-01-2024
 Revised : 01-02-2024
 Accepted: 07-05-2024

Keywords:

Stunting,
 Kepatuhan Aparatur,
 Banyuwangi

Abstract

In Banyuwangi Regency there are 4,367 stunted toddlers out of 10,7840 toddlers. The triggers are couples from early marriages, lack of understanding of child rearing patterns, economic conditions, the quality of maternal nutrition during pregnancy, and lack of nutritional intake for babies. The seriousness of the Banyuwangi Regency Government in preventing and reducing stunting is proven by policies in the form of Banyuwangi Regency Regional Regulation number 7 of 2018 and Banyuwangi Regent Regulation number 39 of 2021. Policies will not be effective if they are not internalized by the apparatus. This research aims to describe, analyze and interpret the efforts of government officials in implementing stunting prevention and reduction. The method used is based on qualitative descriptive principles. Primary data comes from interviews, and secondary data comes from literature reviews and various regulations relevant to the substance of the research. Results: apparatus compliance with stunting prevention and reduction policies has an impact on: (1) supervision of communities affected by stunting; (2) the formation of social relationships so that the community responds quickly to communities affected by stunting; and (3) the formation of a healthy society from one generation to the next. Conclusions from this research: Community participation in stunting prevention and reduction programs in Banyuwangi needs to be supported by improving the quality of the apparatus in internalizing policies regarding stunting prevention and reduction..

PENDAHULUAN

Pemerintah bertugas memperhatikan hak atas kesehatan masyarakat agar terwujud masyarakat adil dan makmur. Pada era sekarang, stunting merupakan masalah kesehatan serius, yang disebabkan meningkatnya pernikahan dini, kondisi ekonomi, kualitas gizi ibu hamil, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting merupakan masalah gizi kronis pada kesehatan balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan anak seusianya (Anjarwati, et al., 2023). Stunting beresiko pada kehidupan anak sampai tumbuh besar, baik terkait fisik, kognitif, maupun kualitas hidup anak saat dewasa.

Balita yang tidak stunting punya tingkat kecerdasan lebih baik dan punya daya saing tinggi di bidang pembangunan dan ekonomi. Pertumbuhan balita optimal bisa mengurangi resiko penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif tersebut seperti diabetes, hipertensi, jantung, hingga ginjal, yang biaya pengobatannya mahal. Jumlah balita di Banyuwangi 10.7840 jiwa. Bulan Februari 2022 terdapat balita dengan stunting sejumlah 4.367 jiwa, namun bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 3.544 atau 3,6% dari jumlah balita di Banyuwangi (Dinas Kesehatan Banyuwangi, 2023)

Desa Kaotan berada di wilayah administratif Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Desa Kaotan memiliki 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Krasak dengan total penduduk 2.800 orang. Desa Kaotan memiliki kasus stunting tertinggi kedua dari 10 Desa di Kecamatan Blimbingsari.

Di Kecamatan Blimbingsari, jumlah balita stunting per Agustus 2022 sejumlah 78 balita atau prevalensi 2.25% dari 3.462 balita yang ada. Padahal jumlah stunting pada balita di bulan Februari 2022 sejumlah 20 balita (Dinas Kesehatan Banyuwangi, 2023). Meningkatnya jumlah stunting di Blimbingsari tidak lepas dari kontribusi dari berbagai desa yang ada. Per Agustus 2022, Desa Kaotan memiliki jumlah balita dengan stunting sejumlah 9 atau 5,14% balita dari sebanyak 175 jumlah balita.

Tabel 1.
 Jumlah Balita Terindikasi Stunting di Kecamatan Blimbingsari (2022)

No	Desa	Stunting		Jumlah Balita	Presentase
		Februari	Agustus		
1	Kaligung	1	59	277	21.3%
2	Kaotan	2	9	175	5.14%
3	Patoman	6	2	320	0.62%
4	Bomo	2	2	360	0.56%
5	Sukojati	2	2	203	0.99%
6	Watukebo	2	1	652	0.15%
7	Karangrejo	1	0	220	0%
8	Gintangaan	0	2	437	0.46%
9	Badean	4	0	478	0%
10	Blimbingsari	0	1	340	0.29%
JUMLAH		20	78	3462	2.25%

Sumber: Pemerintah Kecamatan Blimbingsari (2023)

Desa Kaotan peringkat stunting kedua se-Kecamatan Blimbingsari. Peningkatan jumlah stunting sering mengejutkan masyarakat, dan menjadi perhatian serius pemerintah setiap tingkatan. Banyak masyarakat tidak tahu perihal stunting, baik definisi, penyebab, dampak, hingga penanggulangannya (Saputri & Tumangger, 2019). Ketidaktahuan tentang pola asuh anak sering terjadi karena masyarakat tidak paham tentang bahaya stunting. Pernikahan dini menjadi pemicu utama. Pasangan yang menikah usia dini cenderung belum siap menjadi orang tua. Upaya menekan jumlah stunting menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2018 tentang: Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 tentang: Kewenangan Desa dalam upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa.

Hakekat kebijakan untuk memberi kepastian pada upaya pencegahan dan penurunan stunting. Peningkatan kualitas berpikir masyarakat berpendapatan rendah merupakan tantangan besar bagi pemerintah di setiap tingkatan (Priyanto, et al., 2021). Masyarakat pedesaan menganggap Pemerintah Desa dan pihak Puskesmas kurang memberi penyuluhan terkait stunting. Mudah-mudahan kader Posyandu menjustifikasi balita terkena stunting pada keluarga yang tidak memahami bahaya stunting justru berdampak pada suatu konflik.

Kepatuhan aparatur Pemerintah Desa Kaotan dalam memberikan sosialisasi bahaya stunting pada masyarakat merupakan hal serius. Menurut Adi (dalam Permatasari & Imaniar, 2022), pemberdayaan masyarakat merupakan cara tepat pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik lagi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka agar bisa mengatasi masalah bahaya stunting dengan mandiri. Kegiatan partisipasi dan kegiatan berbasis komunitas dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam meningkatkan gizi pada anak-anak.

Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara simultan. Implementasi suatu kebijakan harus seirama dengan kepentingan masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023). Setiap anak perlu mendapat asupan gizi berupa makanan dan suplemen sejak dalam kandungan, dan Pemerintah menyediakan fasilitas agar menurunkan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian anak, serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018).

Mewujudkan balita dengan gizi yang cukup harus ditunjang dengan tindakan konkrit pemerintah dalam bentuk memberi fasilitas memadai sehingga dapat meningkatkan standar gizi dan kesehatan semua balita. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 39 tahun 2021, Pemerintah desa berwenang mencegah dan menurunkan stunting secara terintegrasi di tingkat desa. Oleh karenanya perlu sosialisasi terkait bahaya stunting, program gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemantauan pada ibu hamil dan pertumbuhan anak secara berkala, dan melakukan indentifikasi dini pada balita beresiko stunting. Artikel ini mengulas tentang upaya aparatur pemerintah desa dalam pencegahan dan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021. Analisis dan hasil diperoleh peneliti dari upaya pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfungsi memahami realitas sosial dengan memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Cahyanti, et al., 2023). Tujuannya menganalisis kepatuhan aparatur Pemerintah Desa Kaotan pada kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021.

Penelitian dilakukan di Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari pada tahun 2023. Data primer dari hasil wawancara dengan informan ditetapkan sesuai purposive sampling; data sekunder dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Analisis pada data kualitatif agar peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pedesaan

Kebijakan publik merupakan produk yang disusun, dirancang dan dibuat pihak legislatif bersama eksekutif sebagai aktor kebijakan, kemudian di implementasi aparatur pemerintah sebagai implementor dalam rangka upaya mencapai sejumlah sasaran yang ditetapkan sebelumnya sebagai esensi dari produk kebijakan. Kebijakan pemerintah harus relevan dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat (Priyanto, 2023). Pada suatu kebijakan, tahap implementasi merupakan hal penting. Suatu kebijakan tidak akan ada nilainya jika tidak di implementasi dengan baik, benar, mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan merupakan langkah aparatur Pemerintah Desa Kaotan dalam rangka mengentaskan dan mencegah kasus stunting, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penanganan stunting karena berdampak pada perkembangan kognitif anak dan pencapaian pendidikan pada anak-anak di masa depan. Dengan melakukan pencegahan dan penurunan stunting dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan pada anak. Keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (Triyanto, et al., 2023). Implementasi kebijakan dalam mengentaskan dan mencegah stunting perlu ditunjang dengan

sinergitas antara Pemerintah Desa Kaotan, Puskesmas, dan Masyarakat. Sinergitas tersebut dalam rangka pemberian sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat terkait pola hidup sehat secara mandiri dan bersih sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.

Stunting tidak hanya disebabkan oleh satu aspek tunggal, tetapi dipengaruhi berbagai aspek yang saling berinteraksi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berdampak pada masalah ekonomi dalam skala individu, rumah tangga, maupun masyarakat keseluruhan. Oleh karenanya implementasi pencegahan dan penurunan stunting harus melibatkan lintas sektor dan berbagai lembaga kepentingan untuk mengatasi semua faktor yang mempengaruhi gizi pada anak. Sebagai implementor, aparatur Pemerintah Desa Kaotan memiliki tanggung jawab mengoptimalkan perannya agar mencapai keberhasilan pada tujuan yang ditetapkan, yaitu pencegahan dan penurunan stunting disetiap tahunnya. Implementasi program kegiatan yang dilakukan aparatur Pemerintah Desa Kaotan untuk meningkatkan gizi, perawatan kesehatan, dan kondisi lingkungan bisa membantu mengurangi angka stunting.

Setiap balita punya kesempatan tumbuh dan berkembang dengan secara sehat. Peneliti berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 memiliki efek besar pada kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.

Analisis Komunikasi Aparatur Berdasarkan Pemikiran Lasswell

Pemerintah Desa Kaotan wajib memberi pelayanan kesehatan masyarakat. Isu atau masalah stunting merupakan hal mendasar dan menyangkut tentang masyarakat. Pemerintah di tiap tingkatan harus memastikan yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan, serta harus memberi dampak kepuasan masyarakat (Rosa, et al., 2023). Aspek penting dalam implementasi kebijakan tentang stunting di Desa Kaotan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 adalah sinergitas antara aparatur Pemerintah Desa, Puskesmas, dan masyarakat. Peneliti menggunakan pokok pikiran Lasswell tentang komunikasi, yang terbagi dalam 5 aspek, yaitu: siapa komunikatornya, apa pesannya, menggunakan media apa, siapa target sarannya, dan apa dampaknya.

Gambar 1.
 Analisis Kepatuhan Aparatur Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting



Sumber: Dikelola dari pemikiran Lasswell (1948)

Pertama, aspek Komunikator. Dalam pandangan Lasswell (dalam Hardjana, 2013), komunikator bertujuan mempengaruhi sasaran khususnya dalam melancarkan proses komunikasi persuasif, dan pesan yang disampaikan diharapkan memiliki efek tertentu, atau kontribusinya pada efeknya dapat terjadi secara berlebih-lebihan dalam komunikasi massa.

Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Jika suatu komunikasi tidak berhasil, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator. Komunikator untuk pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan adalah aparat pemerintah Desa Kaotan dengan melibatkan pihak puskesmas dan masyarakat. Aparatur Desa Kaotan dengan didampingi pihak puskesmas menjalankan program sosialisasi atau musyawarah desa yang tujuannya memberikan pemahaman pada masyarakat terkait bahaya stunting pada balita, sehingga masyarakat atau ibu hamil dapat memberikan serta menjaga gizi seimbang pada perkembangan anak atau janin.

Implementor program merupakan pihak penting dalam kebijakan, karena implementor merupakan penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Implementor adalah penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat pada suatu program (Permatasari, 2022).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pola komunikasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaotan. Tujuan penting dari pola komunikasi oleh komunikator, dalam hal ini Pemerintah Desa Kaotan, bahwa kebijakan yang ada sudah dilaksanakan dengan maksimal. Aparatur Pemerintah Desa Kaotan meyakini bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 merupakan kebijakan yang bermanfaat dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat Desa.

Salah satu keberhasilan komunikator adalah keterlibatan masyarakat dalam membantu komunikasi pada masyarakat terdampak stunting. Selain itu, aparat pemerintah Desa Kaotan memperlihatkan kerja transparan dalam memberi layanan kesehatan pada masyarakat. Berdasarkan pantauan peneliti, keberhasilan komunikasi komunikator adalah upaya Pemerintah Desa Kaotan, pihak Puskesmas, dan Kader Posyandu dalam meningkatkan penyuluhan terhadap bahaya stunting pada balita, pemeriksaan kehamilan secara berkala, dan dengan pemberian imunisasi dan pendampingan gizi pada balita.

Kader Posyandu merupakan unsur masyarakat yang dekat dengan target sasaran, utamanya ibu hamil. Fungsinya melakukan komunikasi antar personal dengan target sasaran. Kader Posyandu dibekali materi dan media untuk kegiatan penyuluhan pada masyarakat. *Kedua*, aspek Pesan. Lasswell (dalam Rachmawati, 2019) menjelaskan suatu model komunikasi tidak hanya fokus pada kajian untuk memahami arti pesan, tetapi terkait dengan semua unsur, proses, saluran, partisipasi, dan bertujuan mencapai maksud tertentu.

Keberhasilan pesan kebijakan terkait stunting bergantung penyampaian implementor pada masyarakat. Penyampaian pesan kebijakan oleh implementor harus disesuaikan dengan target sasaran. Penyampaian pesan terhadap suatu realitas pada target sasaran tertentu bisa antara satu dengan yang lain, disesuaikan kualitas target sasaran.

Jika masyarakat miskin tidak bisa menjangkau program yang ditetapkan, tentu tidak akan mudah menikmatinya (Nadarsyah & Priyanto, 2022). Jika pesan tidak dipahami dengan baik oleh keluarga balita terindikasi stunting maka program tidak bisa berjalan maksimal. Pendapat masyarakat bisa membentuk keberhasilan suatu program. Dengan banyaknya pendapat yang disampaikan masyarakat kepada aparat pemerintah bisa memberi dampak keberhasilan pencegahan dan penurunan stunting.

Hasil penelitian menjelaskan pesan terkait stunting yang disampaikan aparat pemerintah Desa Kaotan pada sasaran tidak sekedar informatif, tetapi lebih ke arah edukatif dan persuasif. Sasaran yang dimaksud adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur, dan remaja putri (Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021). Aparatur Pemerintah Desa Kaotan telah melakukan edukatif terkait cara menyusun dan memenuhi kebutuhan gizi pada balita, cara menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan reproduksi, dan menjaga kebersihan lingkungan serta sanitasi.

Adapun pola persuasif yang dilakukan melalui pengarahan pada remaja putri untuk memanfaatkan obat tablet tambah darah yang diberikan secara rutin melalui puskesmas. Pemberian obat tablet tambah darah sebagai bentuk pencegahan sejak remaja. Tujuannya saat menjadi seorang ibu tidak melahirkan bayi ciri-ciri stunting.

Ketiga, aspek Saluran atau Media. Menurut Lasswell (dalam Perdana, 2021), komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada sasaran agar menimbulkan efek yang di tuju. Pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan agar penerima pesan bisa mendapatkan informasi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Penting dilakukan karena bahaya stunting pada balita bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kampanye stunting merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah rembuk stunting desa melalui berbagai media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan, dan kampanye dapat menggunakan media cetak maupun elektronik, serta dapat berupa kegiatan festival desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi atau anak sehat, dan lain-lain (Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021).

Pemilihan media di kalangan masyarakat harus diketahui dahulu agar terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Media yang bisa dimanfaatkan, seperti: majalah, baliho, flyer, stiker, festival desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal dan komunikasi langsung pada masyarakat. Perlu memanfaatkan platform media sosial dalam pemberian informasi, tips dan fakta terkait gizi serta perawatan anak. Dalam menunjang tersebut, perlu membangun sumber daya online, seperti aplikasi, yang bermanfaat memberi konseling dan panduan bagi orang tua tentang pola makan anak.

Aparatur Pemerintah Desa Kaotan telah membentuk suatu forum atau pertemuan masyarakat yang memiliki balita dan ibu hamil yang di pandu oleh Puskesmas membahas tentang nutrisi, kesehatan, dan layanan kesehatan anak. Peneliti berpendapat, penggunaan kombinasi saluran dapat membentuk strategi komprehensif untuk mencapai tujuan pencegahan dan penurunan angka stunting di Desa Kaotan secara efektif.

Keempat, aspek Sasaran. Implementasi kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan jika tidak diterapkan atau dilaksanakan. Menurut Lasswell, proses komunikasi mempunyai efek atau pengaruh pada khalayak sasaran (Kurniawan, 2018).

Memahami target sasaran untuk pencegahan dan penurunan stunting dengan pedoman Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 perlu memunculkan respon dari sasaran kebijakan. Konsep pengelolaan masyarakat sasaran harus didasari oleh kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Priyanto, 2018). Menentukan sasaran yang jelas adalah langkah penting dalam merancang strategi efektif dan terfokus pada kelompok yang dijadikan target sasaran.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa sasaran program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan adalah unsur Puskesmas, kader posyandu, stakeholder, dan masyarakat.

Keterlibatan Puskesmas dan kader Posyandu untuk memberi penanganan pada balita stunting, memberi penyuluhan kesehatan, dan memberikan pendidikan gizi pada ibu hamil, balita, dan remaja putri. Hasil pementauan peneliti, program yang tersampaikan pada sasaran berkaitan dengan peningkatan berat badan pada bayi, peningkatan tinggi badan anak, peningkatan asupan gizi, dan penurunan angka kejadian stunting. Tidak semua masyarakat mendapat bantuan dari pencegahan dan penurunan stunting dari pemerintah, karena harus memenuhi beberapa kriteria. Meski demikian, dengan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kaotan, masyarakat tetap bisa meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan kesehatan yang berkualitas.

Masyarakat dalam program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan tidak hanya menerima manfaatnya saja, melainkan dapat berperan sebagai pengawas dalam implementasi pemenuhan kesehatan. Tujuannya agar tidak ada penyelewengan. Peneliti berpendapat, aktifnya pengawasan oleh sasaran berdampak pada implementasi program yang efektif dan efisien. Pelayanan tidak adil dan tidak berkualitas menyebabkan ketidakpuasan masyarakat (Nana & Hary, 2023).

Kelima, Efek. Lasswell (dalam Perdana, 2021) menyatakan efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan, sehingga mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tingkah laku seorang. Efek merupakan tolak ukur keberhasilan strategi komunikasi, karena berdampak pada strategi selanjutnya. Oleh karenanya upaya pencegahan dan penurunan stunting pada balita harus dengan menciptakan kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa tidak pahamnya masyarakat tentang stunting karena komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan bersifat terbatas, baik peserta, waktu, maupun anggaran. Jika mayoritas masyarakat dapat mengikuti program kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, maka efek yang ditimbulkan adalah kualitas sumber daya manusia dan kemajuan Desa Kaotan.

Peneliti berpendapat, efek positif sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita Desa Kaotan tanpa stunting. Oleh karenanya implementasi kebijakan tentang stunting harus masif sehingga berefek positif pada masyarakat sasaran. Meski demikian, evaluasi terhadap implementasi program merupakan hal penting (Noviana & Priyanto, 2023).

PENUTUP

Simpulan

Kepatuhan aparatur Pemerintah Desa Kaotan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting telah berdampak pada 3 hal, yaitu: (1) pengawasan terhadap lingkungan masyarakat terdampak stunting, (2) terbentuknya hubungan sosial sehingga tiap masyarakat merasa harus memberi respon cepat terhadap keberadaan masyarakat yang terdampak stunting, dan (3) terbentuknya semangat masyarakat dalam membentuk lingkungan sehat dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Rekomendasi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 merupakan kebijakan prioritas dalam pencegahan dan penurunan stunting di Banyuwangi. Aparatur harus memahami jika keberhasilan pencegahan dan penurunan stunting berangkat dari kualitas aparatur dalam menafsirkan kebijakan, implementasi yang sesuai, adanya partisipasi publik, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023). Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: [10.37680/almikraj.v4i1.3568](https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3568);
- Cahyanti, S. R. D., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2023). Tata Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Peraturan Daerah 7/2020. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 156-167. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.974;
- Hardjana, A. (2013). Teori Komunikasi: Kisah Pengalaman Amerika. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). Doi: 10.24002/jik.v1i2.161;
- Kurniawan, D. (2018). Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(1), 60. Doi:10.32585/jkp.v2i1.65;
- Lasswell, Harold D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*, in Lyman Bryson (editor). 1948. *The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies, Jewish Theological Seminary of America;
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-

- 6684-4620-1.ch007;
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (02). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Nana Noviana Nadarsyah, Hary Priyanto Priyanto (2023). In Cultural Perspektive: Sexuality and Gender Performance. *Handbook of Research on Diversity and Gender Differences in Spiritual Experiences*. Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2018 tentang: Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 tentang: Kewenangan Desa dalam upaya Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Desa;
- Perdana, K. (2021). Analisa Model Komunikasi Lasswell Pada Halaman “@aswaja_sunda” Dalam Turut Mempertahankan Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah di Media Instagram. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 5(01), 25-38. Doi: 10.51925/inc.v5i01.47;
- Permatasari, S. J. (2022). Pengembangan Program Desa Wisata Berbasis Jejaring Bisnis Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 133–139 .Doi:10.38156/gjkmp.v12i2.107;
- Permatasari, S. J., & Imaniar, D. (2022). Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa (Studi Pada Bumdes Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(1), 9. Doi:10.26418/j-psh.v13i1.52074;
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 2615–3076 .Doi:10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Rachmawati, Ike. (2019). Strategi Komunikator Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelanggan Air Minum PDAM Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 47-61. Doi: 10.23969/kebijakan.v10i1.1421;
- Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. Doi:10.33019/jpi.v1i1.2;
- Triyanto, Y., Sari, R., Rahayu, S., Lubis, J. R., & Siregar, R. A. (2023). Cegah Stunting Melalui Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1161–1171. Doi: 10.22236/solma.v12i3.12914.